

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023 (LPPD)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar berperan penting dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pengendalian kualitas penduduk untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang antara lain diupayakan melalui Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut terus dipertahankan sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan maka untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Berkaitan dengan keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Program KB dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Walaupun demikian, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tetap ada, seperti masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta belum meratanya LDP (Local Development Plan) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pendataan penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebanyak 125.892 jiwa dengan jumlah 36.311 Kepala Rumah Tangga. Oleh karena itu dalam program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2021 – 2026 melalui RPJMD program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana masih menjadi program prioritas untuk mengatasi masalah pengendalian penduduk dan pelebagaan keluarga kecil yang berkualitas.

Dengan berakhirnya pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023, maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 dengan sasaran – sasaran kinerja dalam RKP bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Amin.

Benteng, 05 Februari 2024

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19650806 199402 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Gambaran Umum DP3AP2KB..... 1

1.2. Stuktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....3

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara.....6

1.4. Inovasi16

1.5. Penghargaan16

1.6. Realisasi Keuangan17

BAB. II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN..... 22

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan IKK
Keluaran/Output 22

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan IKK
Hasil/Outcome25

BAB. III PENUTUP26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum DP3AP2KB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A dan terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Email : bppkbkep.selayar@gmail.com , Tlp. (0414) 21195, dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki

kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



1.2. STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

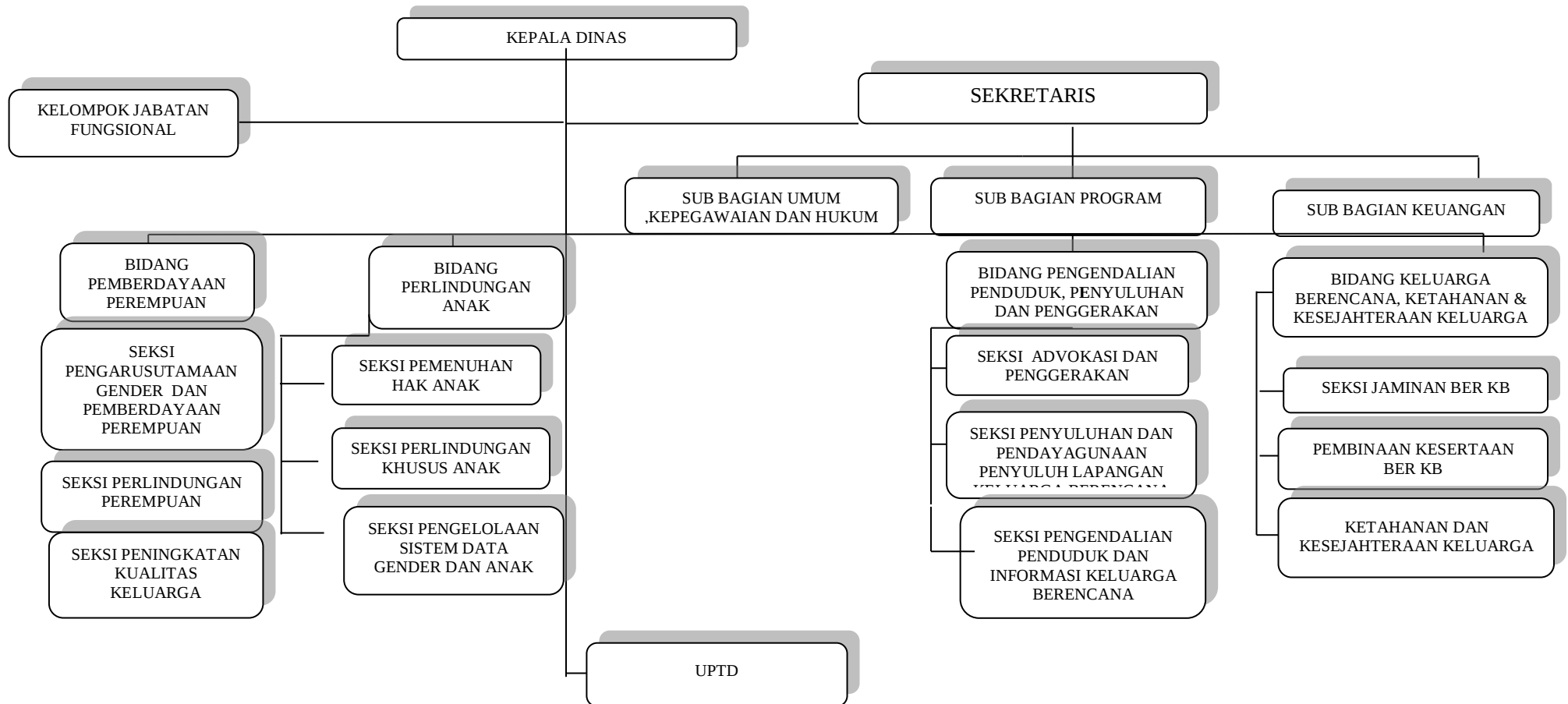
1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub. Bagian Program
 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD
- VIII. Jabatan Fungsional;

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Jabatan Struktural yang belum Terisi.

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Tabel. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jabatan	Struktural	Fungsional	Ket.
Eselon II/a	0 orang		
Eselon II/B	1 orang		
Eselon III/A	1 orang		
Eselon III/B	4 orang		
Eselon IV/A	6 orang		
Eselon IV/B	1 orang		
Fungsional		5 orang	
		17 Orang Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
		8 Orang P3K Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
Pelaksana	12 orang		
Jumlah	25	30	

2. Data Jabatan Struktural

Tabel. Jabatan Struktural

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	Drs. ANDI MASSAILE Nip. 19650806 199402 1 003	Kepala Dinas DP3AP2KB	
2	Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd.,M.M. Nip. 19750426 200003 2 009	Sekretaris Dinas DP3AP2KB	
3	MARLINA ,SE Nip. 19670817 200003 2 006	Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
4	UTAMI REZKI, SH	Kabid. KB, Ketahanan	

	Nip. 19720118 2000604 2 016	& Kesejahteraan Keluarga	
5	ANDI IRMAYANI, SP Nip. 19851028 200803 2 002	Kabid. Perlindungan Perempuan & Perlindungan Khusus Anak	
6	NURFACHRIANSYAH ILYAS, SKM.,M.Kes Nip. 19840602 201101 1 014	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan & Pemenuhan Hak Anak	
7	Dra. SITTI NURSIHAH Nip. 19690812 200701 2 036	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	
8	NUR MAYASARI, S.Pt Nip. 19801128 201001 2 006	Kepala Sub. Bagian Program	
9	ANDI HAMDANA, SE Nip. 19690403 199303 2 010	Kepala Sub. Bagian Keuangan	
10	ILHAM, S.Pd.I Nip. 19661104 198603 1 006	Kepala UPT Wilayah III	
11	M. TAHIR, S.IP Nip. 19740705 200701 1 050	Kepala UPT Wilayah II	
12	Hj. NURHADI MANDAI, S.Pd Nip. 19660504 198603 2 015	Kepala UPT Wilayah IV	
13	YUSRIADI, SE Nip. 19801106 201001 1 003	Kepala UPT Wilayah VII	
14	KAMIRUDDIN Nip. 19770815 200906 1 001	Pengelola Kepegawaian	
15	GAZALI Nip. 19730608 200906 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian	
16	BAHTIAR, A.Md Nip. 19730307 201502 1 001	Pengelola Kepegawaian UPTD PK & KB Wilayah V	

3. Data Jabatan Fungsional

Tabel. 1. Jabatan Fungsional

No.	Nama	Jabatan Fungsional	KET.
1	SUHARMIYANI, S.STP Nip. 19911107 201206 2 001	Fungsional Analisis Kebijakan	
2	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dr. NURSIAH, S.Ag., M.Si Nip. 19700609 200604 2 013	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	
3	ISNAWATI, S.Sos Nip. 19740729 200604 2 019	Fungsional Pekerja Sosial Muda	
4	IRNAWATI, S.Pi Nip. 19831019 201101 2 012	Fungsional Analisis Kebijakan	
5	ANDI OPU, SE Nip. 19740104 200701 2 015	Fungsional Penata Kependudukan & KB Muda	
6	ANDI SOFIYANTI, S.Ag Nip. 19770308 201101 2 008	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
7	DARMAWATI, SH Nip. 19730314 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec.	Pegawai Pusat

		Bontoharu	
8	M. TABRIS. S Nip. 19660810 198803 1 015	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomanai	Pegawai Pusat
9	NURNIAH. M, AMKL Nip. 19730405 200604 2 024	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
10	ROSDIANA, S.Ag Nip. 19730117 201101 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
11	SUWARSI NOVIANTI, SE Nip. 19800307 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
12	AMBO RAPPE. M Nip. 19760912 201001 1 012	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kec. Pastim	Pegawai Pusat
13	ANDI TAWAKKAL Nip. 19820621 201410 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
14	ASMARANI	Penyuluh	Pegawai

	Nip. 19721219 201407 2 003	Keluarga Berencana Kec, Bontomanai	Pusat
15	BAHYANI Nip. 19700109 201212 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
16	Hj. NURHAYATI Nip. 19660620 201212 2 002	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Taka Bonerate	Pegawai Pusat
17	MUHAMMAD ANSAR Nip. 19740702 201407 1 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
18	NASMAWATI Nip. 19701008 201407 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
19	NURDIN Nip. 19670211 200701 1 018	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasilambena	Pegawai Pusat
20	RAHMIATI Nip. 19820329 200801 2 021	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat

21	SUPARMAN, SP Nip. 19800130 201502 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontosikuyu	Pegawai Pusat
22	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne SURYANI Nip. 19680513 201410 2 002	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat

Tabel. 2. Jabatan Fungsional Umum Pelaksana

No.	Nama	Jabatan Fungsional	KET.
1	RISNAWATI. DP, S.IP Nip. 19840511 201407 2003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
2	Hj. NURNIATI. A Nip. 19700425 199003 2 006	Pengadministrasi Umum	
3	SITTI NURAENI Nip. 19680303 199103 2 019	Pengadministrasi Umum	
4	HUSNI LAEGO, S.Sos Nip. 19880122 202203 2 002	Analisis Advokasi & Komunikasi, Informasi & Edukasi	
5	SILVY SUTRI INSANI ASIS, S.Sos Nip. 19970307 202203 2 009	Analisis Perlindungan Perempuan	
6	NURSYAMSI, S.Sos Nip. 19980411 202203 2 011	Analisis Perlindungan Perempuan	
7	SABARIAH Nip. 19670102 200604 2 017	Pengadministrasi Keuangan	
8	HARTATI Nip. 19690204 200906 2 001	Pengadministrasi Keuangan	
9	SYAMSIRAWATI Nip. 19830710 200903 2 003	Pengadministrasi Kepegawaian	

Tabel. 2. P3K PENYULUH KB PUSAT

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	JUMRAWATI, S.Sos Nip. 197205172022212001	PKB Ahli Pertama	
2	SABDA ALAM, SKM Nip. 199104202022211002	PKB Ahli Pertama	
3	MUSLIADI, S.E Nip. 199102242022211003	PKB Ahli Pertama	
4	ANDI TAZKIR SAIFUL, S.Pd Nip. 198207012022211001	PKB Ahli Pertama	
5	SULASTRI, S.IP Nip. 199103312022212001	PKB Ahli Pertama	
6	ANDI ULFAWATI REZKI, A.Md.Keb Nip. 199201032022212008	PKB Terampil	
7	WIWI APRIANI, A.Md.Keb. Nip. 199404102022212005	PKB Terampil	
8	ANDI GUNAWAN, ST Nip. 198707312023211018	PKB Ahli Pertama	

4. Jumlah Tenaga Kontrak / Pekerja Harian Lepas (PHL)

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	ISRAWATI IDRIS, SP	PHL	
2	ITA SAHARA, SE	PHL	
3	JUMRIATI, SE	PHL	
4	FAJRIANI, SE	PHL	
5	NUR NENENG SAFITRI, S.Pd	PHL	
6	NELLY HAMDANA, S.Sos	PHL	
7	SITTI AISAH	PHL	
8	KASMIATI, S.A.P	PHL	

9	RIDAWATI, A.Md	PHL	
10	MUHAMMAD IKBAL, S.Pd	PHL	
11	NUR MAYA	PHL	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
12	FITRIANI	PHL	
13	RESTIA YULIANA, S.A.P	PHL	
14	SRI WAHYUNI. S	PHL	
15	HUJRANA. R,S.Pd	PHL	
16	BASNIA, S.A.P	PHL	
17	DESY SELFIANI, SKM	PHL	
18	RISKA ASTRIWANA KARIM	PHL	
19	DESI YULIANA PUTRI	PHL	
20	IRWAN SAPUTRA	PHL	
21	SATRIANI, S.Pd	PHL/ PENYULUH KB	
22	NUR INSANA, S.Kep. NS	PHL/ PENYULUH KB	
23	NUR RAHMAN HASFAR, S. Sos	PHL/ PENYULUH KB	
24	SULFIANI, S.M	PHL/ PENYULUH KB	
25	HASMIATI, S.M	PHL/ PENYULUH KB	
26	ANUGRAH PUTRA, S.Kom	PHL/ PENYULUH KB	
27	CITRAWATI	PHL/ PENYULUH KB	
28	TALLASIANG	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
29	NOFALIA	PHL/ PENYULUH KB	
30	NIRMAWATI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB
31	DARMAWATI	PHL/ PENYULUH KB	
32	ERMI SAHARA	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
33	SELVA ATRIANI KALSUM SUDMAYADI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
34	ISNAWATI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
35	PEDI KRISTAL FIKRAM	PHL/ PENYULUH KB	
36	NURHAERANI	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh

37	ROSNANI NINGSI	PHL/ PENYULUH KB	
38	NIRWANA	PHL/ PENYULUH KB	
39	NUR ABIDIN JAMAL	PHL/ PENYULUH KB	
40	NURMUFIDAH	PHL/ PENYULUH KB	
41	SITTI HUBAYA	PHL/ PENYULUH KB	Lulus P3K Pusat / Penyuluh
42	ROSMIDA	PHL/ PENYULUH KB	
43	ANDI ZULFIANA	PHL/ PENYULUH KB	
44	MUSDALIFAH	PHL/ PENYULUH KB	
45	BAU NARRU	PHL/ PENYULUH KB	
46	NASRULLAH	PHL/ PENYULUH KB	

5. Jabatan yang Belum Terisi

No.	Nama Jabatan	Jumlah	KET.
1	Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum		
1	Operator Layanan Operasional	1	
2	Sub. Bagian Program		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	
2	Pengolah Data dan Informasi	1	
3	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	
3	Kepala Sub Bagian Keuangan		
1	Operator Layanan Operasional	1	
	Bendahara		
	Pengelola Gaji	1	
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	Pengadministrasi Perkantoran	1	
5	Bidang Perlindungan Anak		
1	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	

6	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
1	Penelaah Teknis Kebijakan	1	
2	Pengadministrasi Perkantoran	1	

6. Jabatan Fungsional yang Belum Terisi

No.	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah	KET.
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan		
	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	2	
2	Bidang Perlindungan Anak		
	Fungsional Pekerja Sosial Muda	2	
3	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan		
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	2	
4	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda	3	

1.4. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	GERAKAN SEHATI (Selesaikan Pendidikan, Hasilkan Pendapatan dan Tiba saatnya untuk Menikah)	Meningkatkan Pemahaman anak tentang dampak perkawinan anak dan Pencegahan Kahamilan Usia anak dan pentingnya pendidikan, sehingga bisa berdampak pada penurunan angka perkawinan anak	Menurunnya angka Perkawinan Anak pada Tahun 2022 sebanyak 331 dan Tahun 2023 sebanyak 163.	

1.5. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2022		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
2.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2023		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	

1.6. Realisasi Keuangan

Kode Rekening	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,320,017,180.00	7,460,457,196.00	859,559,984.00	89,67
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,503,199,900.00	4,294,587,480.00	208,612,420.00	95,37
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,811,745,900.00	3,628,942,480.00	182,803,420.00	95,20
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,318,300.00	22,897,500.00	5,420,800.00	80,86
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,086,500.00	15,701,700.00	5,384,800.00	74,46
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,608,900.00	1,572,900.00	36,000.00	97,76
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	798,000.00	798,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2,389,900.00	2,389,900.00	0.00	100
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,077,088,000.00	2,920,671,139.00	156,416,861.00	94,92
2 08 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,042,550,000.00	2,886,498,139.00	156,051,861.00	94,87
2 08 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,376,000.00	26,011,000.00	365,000.00	98,62
2 08 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100
2 08 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	100
2 08 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,802,000.00	1,802,000.00	0.00	100
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,420,000.00	9,020,000.00	400,000.00	95,75
2 08 01 2.05.09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9,420,000.00	9,020,000.00	400,000.00	95,75

2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274,235,200.00	263,589,600.00	10,645,600.00	96,12
2 08 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,278,000.00	16,278,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,624,000.00	7,216,000.00	408,000.00	94,65
2 08 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,260,400.00	3,092,400.00	168,000.00	94,84
2 08 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242,197,800.00	232,128,200.00	10,069,600.00	95,84
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,608,000.00	22,861,000.00	2,747,000.00	89,27
2 08 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,608,000.00	22,861,000.00	2,747,000.00	89,27
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284,736,400.00	281,753,862.00	2,982,538.00	98,95
2 08 01 2.08.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,490,000.00	69,896,262.00	2,593,738.00	96,42
2 08 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212,246,400.00	211,857,600.00	388,800.00	99,82
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	112,340,000.00	108,149,379.00	4,190,621.00	96,27
2 08 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,630,000.00	34,477,084.00	152,916.00	99,56
2 08 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,270,000.00	50,470,920.00	3,799,080.00	93,00
2 08 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,190,000.00	8,955,625.00	234,375.00	97,45
2 08 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	14,250,000.00	14,245,750.00	4,250.00	99,97
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	522,188,800.00	520,898,200.00	1,290,600.00	99,75
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	22,188,800.00	20,898,200.00	1,290,600.00	94,18
2 08 02 2.01.02	Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22,188,800.00	20,898,200.00	1,290,600.00	94,18

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 03 2.03	Pencegahann Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 04 2.01 01	Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	83,000,000.00	69,135,000.00	13,865,000.00	83,29
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan DUNia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	83,000,000.00	69,135,000.00	13,865,000.00	83,29
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33,000,000.00	30,513,000.00	2,487,000.00	92,46
2 08 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	38,622,000.00	11,378,000.00	72,24
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50
2 08 07 2.01	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan PERlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50

2 08 07 2.01 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,816,817,280.00	3,165,869,716.00	650,947,564.00	82,95
2 14 02	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	175,400,000.00	150,338,686.00	25,061,314.00	85,71
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	175,400,000.00	150,338,686.00	25,061,314.00	85,71
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34,200,000.00	34,160,000.00	40,000.00	99,88
2 14 02 2.02 13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	77,000,000.00	70,443,686.00	6,556,314.00	91,49
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaportan Program KKBPK	64,200,000.00	45,735,000.00	18,465,000.00	71,24
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,619,917,280.00	2,028,396,030.00	591,521,250.00	77,42
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,015,650,000.00	886,461,750.00	129,188,250.00	87,28
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	80,000,000.00	76,988,000.00	3,012,000.00	96,24
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000.00	148,920,000.00	1,080,000.00	99,28
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	143,000,000.00	142,309,000.00	691,000.00	99,52
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	562,650,000.00	452,016,750.00	110,633,250.00	80,34
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	80,000,000.00	66,228,000.00	13,772,000.00	82,79
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	593,996,280.00	593,996,280.00	0.00	100
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional; PKB/PLKB	20,396,280.00	20,396,280.00	0.00	100
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	573,600,000.00	573,600,000.00	0.00	100

2 14 03 2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	582,771,000.00	392,636,000.00	190,135,000.00	67,37
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45,000,000.00	34,760,000.00	10,240,000.00	77,24
2 14 03 2.03 03	Peningkata Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	487,071,000.00	308,168,000.00	178,903,000.00	63,27
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25,500,000.00	25,278,000.00	222,000.00	99,13
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	25,200,000.00	24,430,000.00	770,000.00	96,94
42 14 03 2.04	<i>Pendayagunaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB</i>	427,500,000.00	155,302,000.00	272,198,000.00	36,33
42 14 03 2.03	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9,000,000.00	8,982,000.00	18,000.00	99,80
42 14 03 2.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	418,500,000.00	146,320,000.00	272,180,000.00	34,96
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,021,500,000.00	987,135,000.00	34,365,000.00	96,64
2 14 04 2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga</i>	1,021,500,000.00	987,135,000.00	34,365,000.00	96,64
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360,000,000.00	352,170,000.00	7,830,000.00	97,83
2 14 04 2.01 04	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK_R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	661,500,000.00	634,965,000.00	26,535,000.00	95,99
TOTAL		8,320,017,180.00	7,460,457,196.00	859,559,984.00	89,67

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN IKK KELUARAN/OUTPUT TAHUN 2023

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1							
		289	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG $\frac{\text{Jumlah lembaga pemerintah yg sudah dilatih PUG}}{\text{Jumlah lembaga pemerintah}} \times 100\%$	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	Tidak di Anggarkan
		290	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yg sudah dievaluasi melalui analisis gender}}{\text{Jumlah lembaga pemerintah}} \times 100\%$	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	Tidak di Anggarkan
		291	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah Media Massa	4	Bid. PA	
		292	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-	-	Bid. Perlindungan Anak	Belum ada Layanan Anak yang memiliki SPM di Kab. Kep. Selayar
		293	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani $\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah Korban kekerasan anak ditingkat provinsi}} \times 100\%$	$\frac{(12 \times 100\%)}{12}$	100%	Bid. PA	
		294	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah Layanan Anak 7 Lembaga	7	Bid. Perlindungan Anak	
		295	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	-		Dinas Sosial
		296	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang Perempuan Tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan $\frac{\text{Jumlah ormas pr yang sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh ormas yang ada}} \times 100\%$	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	Tidak di Anggarkan
		297	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih $\frac{\text{Jumlah kader pr yang sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh kader pr}} \times 100\%$	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	Tidak di Anggarkan
		298	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan $\frac{\text{Jumlah lembaga layanan PP yg sudah dilatih}}{\text{Jumlah seluruh lembaga layanan yg aktif}} \times 100\%$	-	-	Bid. PP	Tidak di Anggarkan

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		299	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1. P2TP2A 2. PUSPAGA	2	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		300	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	-	-	Belum ada kebijakan
		301	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	-	-	-	Blm ada lembaga di Kep. selayar
		302	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\%$ 100%		
2.							
		336	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	1 Dok	1	Bid. KB
		337	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-		≥ 20	Bid. Dalduk
		338	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah Kelahiran Remaja Kelompok Umur 15-19 Tahun}}{\text{Jumlah kelompok umur 15 - 19}} \times 100\%$	$\frac{4.405}{13245} \times 100\%$ 33,25		Bid. Dalduk
		339	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi & KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi KIE)}} \times 100\%$	$\frac{15.222}{12.997} \times 100\%$ 1,171%		Bid. Dalduk
		340	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	$\frac{\text{Jumlah stakeholder & mitra kerja yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK}}{\text{Jumlah sasaran stakeholder pemangku kepentingan & mitra kerja}} \times 100\%$	$\frac{21}{9} \times 100\%$ 2,33%		Bid. Dalduk
		341	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah Faskes}} \times 100\%$	$\frac{17}{17} \times 100\%$ 100%		Bid. Dalduk
		342	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah MKJP}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	$\frac{3.901}{13.422} \times 100\%$ 29,06		Bid. Dalduk
		343	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Pokja Kampung KB	88		Bid. Dalduk

No.	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		344	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Persalinan menurut metode kontrasepsi cara moderen}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	$\frac{1.690}{2.643} \times 100 \%$	63,94	Bid. Dalduk	Siga
		345	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		$\frac{80}{13.422} \times 100 \%$	0,059	Bid. Dalduk	Siga
		346	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$	$\frac{8.655}{10.233} \times 100 \%$	84,57	Bid. Dalduk	Siga

2.2 . Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		47	Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD	$\frac{901313110529}{1136008538012} \times 100\%$	0,543	PP
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	$\frac{12}{40450} \times 100\%$	0,00029	Bid. Perlindungan Anak
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk Perempuan	$\frac{10}{72193} \times 100.000\%$	0,00013	PP
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		66	TFR (Angka Kelahiran Total)			1,9	Bid. Dalduk
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{13422}{20345} \times 100\%$	65,97	Siga 2023 PUS Peserta KB Modern & Tradisional
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{2611}{20534} \times 100\%$	12,71	Siga 2023 PUS bukan Peserta KB

BAB III

PENUTUP

Dalam upaya peningkatan akses Pelayanan KB dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak di perlukan dukungan kebijakan dan dukungan operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dukungan kebijakan yang sangat diperlukan lebih difokuskan dalam hal Pemberdayaan kapasitas institusi, sehingga mampu mengelola kepentingan daerah secara umum dan kepentingan program KB dan Pemberdayaan Perempuan khususnya.

Dalam era otonomi daerah saat ini, tidak sedikit petugas lapangan dan penyuluh KB dialih tugaskan untuk menduduki jabatan tertentu yang menyebabkan roda pelaksanaan program KB belakangan ini dirasakan terganggu. Untuk itu perlu dilakukan upaya penggantian dan penambahan petugas lapangan dan penyuluh lapangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan adanya LPPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjadikan sebagai acuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan Akuntabilitas, kami menyadari dalam penyusunan LPPD ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan usulan yang sifatnya konstruktif akan kami terima sebagai perbaikan dalam penyusunan LPPD tahun berikutnya.

Benteng, 05 Februari 2024

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199402 1 003